

Analisis flypaper effect pada belanja daerah

Muhammad Iqbal Fhahrulreza Ginting^{1✉}, Adi Wijaya², Muhammad Awaluddin³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Abstrak

Terdapat kekhawatiran ketika pemerintah daerah menerima bantuan dana dari pemerintah pusat, dimana hal ini justru dapat meningkatkan pengeluaran belanja daerah lebih dari yang diharapkan seandainya uang yang sama diperoleh secara mandiri melalui pendapatan asli daerah, yang mana fenomena ini dikenal sebagai flypaper effect. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya flypaper effect pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan regresi data panel pada data anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2013-2020. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan kelompok pendapatan transfer (pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil bukan dari pajak dan dana alokasi umum), keduanya berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan dana alokasi khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah. Namun ketiganya dari kelompok pendapatan transfer, yaitu pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil bukan dari pajak dan dana alokasi umum memiliki nilai koefisien regresi yang lebih besar daripada pendapatan asli daerah, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi flypaper effect pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Kata kunci: Flypaper effect; belanja daerah; pendapatan asli daerah; dana transfer

Analysis of flypaper effect on regional spending

Abstract

There are concerns when local governments receive financial assistance from the central government, where this can actually increase regional spending more than expected if the same money is obtained independently through regional original income, in which this phenomenon is known as the flypaper effect. This study aims to determine whether there is a flypaper effect on district/city regional spending in East Kalimantan Province by using panel data regression on district/city regional budget revenue and expenditure data in East Kalimantan Province during the 2013-2020 period. The results of testing the hypothesis show that regional original revenue and transfer income groups (tax revenue sharing, non-tax revenue sharing and general allocation funds), both have a significant effect on regional spending. Meanwhile, special allocation funds have no significant effect on regional spending. However, all three from the transfer income group, namely tax revenue sharing, non-tax revenue sharing and general allocation funds have a regression coefficient value that is greater than the regional original revenue, so it can be concluded that there has been a flypaper effect on district/city regional spending in East Kalimantan Province.

Key words: Flypaper effect; regional expenditure; regional original revenue; transfer funds

PENDAHULUAN

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sampai dengan dilakukannya pelimpahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah menjadi langkah awal dimulainya otonomi daerah di Indonesia. Meskipun awal mula pendelegasian ini dipicu oleh adanya krisis ekonomi dan politik pada tahun 1998, dampak pendelegasian ini sejatinya dimaksudkan pula untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah sebagai pelaksana anggaran daerah, dirasa memiliki informasi yang lebih sempurna tentang sektor mana dari alokasi anggaran yang mungkin dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi (Kusuma, 2017).

Desentralisasi fiskal sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang menyangkut alokasi anggaran daerah berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam pengalokasiannya (Neyapti, 2010). Potensi pengalokasian anggaran yang tidak efisien ini kemungkinan akan muncul dari kewenangan daerah dalam mengalokasikan pendapatan daerah, termasuk dana transfer. Seiring dengan peningkatan anggaran belanja daerah, persentase dana transfer yang diajukan ke pemerintah pusat terus meningkat. Ini karena pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk meningkatkan proporsi dana transfer untuk daerahnya masing-masing yang didasarkan pada celah fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Daerah yang tidak memiliki kemampuan fiskal dalam memenuhi APBD menuntut jumlah dana transfer yang lebih besar dari pemerintah pusat. Hal tersebut menjadi celah yang dapat dimanfaatkan beberapa daerah untuk memanfaatkan limpahan fiskal pemerintah pusat (Kusuma, 2017).

Kebijakan transfer dari pemerintah pusat tidak hanya berdampak pada masalah kurangnya anggaran yang dihadapi masyarakat, tetapi juga pada efektivitas kebijakan akibat perilaku birokrasi yang berlebihan dalam merespon bantuan keuangan. Perspektif tersebut, selanjutnya, jauh lebih didasarkan pada pengamatan empiris tentang dampak pendapatan dan hibah terhadap anggaran daerah. Transfer tersebut diharapkan dapat mengurangi beban pajak masyarakat setempat sesuai dengan bantuan fiskal dari pemerintah pusat. Namun, birokrasi dengan kewenangan anggarannya mengambil keuntungan untuk menetapkan anggaran yang lebih tinggi diikuti dengan peningkatan pajak daerah (Thompson & Green, 1998:381).

Sementara itu Bradford dan Oates pada tahun 1971 dalam jurnalnya yang berjudul "The Analysis of revenue Sharing in a New Approach to Collective Fiscal Decisions", menemukan bahwa kenaikan belanja pemerintah daerah lebih elastis terhadap dana transfer dari pemerintah pusat jika dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah yang lain. Literatur keuangan publik kemudian mulai menyebut fenomena ini dengan nama fenomena flypaper effect (Tresch, 2022:515). Apa yang disebut "flypaper effect" telah menjadi subyek perdebatan teoritis dan empiris yang luas sejak anomali ini pertama kali diidentifikasi (Henderson, 1968; Gramlich, 1969). Tolok ukurnya adalah kenyataan bahwa di dunia tanpa risiko, sumber pendapatan diasumsikan tidak berpengaruh pada alokasi sumber daya yang optimal, baik antara barang swasta dan barang publik (Bailey & Connolly, 1998).

Provinsi Kalimantan Timur merupakan satu diantara Provinsi dengan potensi sumber daya alam melimpah dimana hasil-hasilnya sebagian besar diekspor ke luar negeri, sehingga Provinsi ini merupakan penghasil devisa utama bagi Negara. Berikut ini disajikan kondisi kemandirian daerah masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 1.

Kondisi Kemandirian Daerah Otonom di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 (Dalam Triliun Rupiah)

Kabupaten/Kota	Belanja Daerah	PDRB	PAD	Rasio PAD/PDRB (%)	Rasio PAD/Belanja Daerah (%)
Balikpapan	2,14	103,84	0,61	0,59	28,41
Berau	2,31	35,45	0,23	0,66	10,12
Bontang	1,45	55,66	0,20	0,36	13,79
Kutai Barat	1,73	27,17	0,15	0,54	8,52
Kutai Kartanegara	4,55	149,04	0,45	0,30	9,91
Kutai Timur	2,97	115,56	0,21	0,19	7,22
Mahakam Ulu	1,24	2,77	0,02	0,75	1,68
Paser	2,05	43,24	0,17	0,40	8,44
Penajam Paser Utara	1,27	9,05	0,09	0,97	6,93
Samarinda	2,98	66,54	0,49	0,73	16,30

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur masih belum maksimal, dimana dari potensi perekonomian yang tersedia berdasarkan angka pembentukan PDRB, rata-rata pendapatan asli daerah yang diterima masih dibawah angka 1% dari total PDRB. Sehingga hal ini berimbas pula pada kemampuan pendapatan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah yang rata-rata masih sangat rendah. Yang pada akhirnya pemenuhan belanja daerah sangat bergantung pada besarnya dana transfer yang diberikan pemerintah pusat.

Dana transfer dari pemerintah pusat yang memberikan kontribusi besar pada belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan asli daerah akan menciptakan insentif bagi pemerintah daerah, yang memiliki kekuasaan atas kebijakan daerah dan lebih mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah, untuk meningkatkan belanja daerah tanpa perlu meningkatkan pendapatan daerah. Sumber pendapatan ini kemudian memikat pemerintah daerah untuk cenderung memenuhi kondisi tertentu yang diperlukan untuk menarik lebih banyak transfer dari pemerintah pusat, daripada kondisi dan kebutuhan masyarakat daerah yang mereka layani. Sehingga mengikis esensi dari desentralisasi, yaitu mendorong terbentuknya daerah yang otonom (Rao & Singh, 1998).

Indikasi flypaper effect pada anggaran belanja pemerintah daerah bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi. Penelitian Swasito (2021) yang menguji respon kebijakan belanja pemerintah daerah di Indonesia selama rentang periode 2010-2019 terhadap kenaikan atau penurunan dana transfer dari pemerintah pusat (Dana Perimbangan) dan Pendapatan Asli Daerah, menemukan bahwa kebijakan belanja pemerintah daerah lebih responsif terhadap kenaikan atau penurunan penerimaan daerah berupa DAU, artinya ada fenomena flypaper effect pada kebijakan belanja publik di Indonesia. Selain itu, penelitiannya juga menemukan bahwa penurunan penerimaan daerah berupa DAU juga menyebabkan kontraksi pada belanja publik, yang artinya flypaper effect yang ada tidak bersifat asimetris.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini kemudian dimaksudkan untuk menganalisa ada tidaknya flypaper effect pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk melihat ada tidaknya flypaper, dapat dilakukan dengan melihat respon langsung dari pemerintah daerah dalam menyingkapi dana transfer sebagai dana hibah, khususnya dana perimbangan yang direalisasikan pada APBD. Ketika respon ke area belanja lebih besar dari penerimaan transfer, maka flypaper diindikasikan telah terjadi (Oates 1999).

METODE

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan cara pengukuran dari masing- masing variabel tersebut dengan formulasi yang didasarkan pada konsep teori, sebagai berikut:

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang dipergunakan untuk menjalankan berbagai kegiatan pemerintah daerah, baik yang memberi manfaat jangka pendek maupun jangka panjang selama tahun 2013 sampai dengan 2020.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang bersumber dari: 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 4) Lain-Lain PAD yang Sah, dalam APBD tahun anggaran 2013 sampai dengan 2020.

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah realisasi pendapatan transfer yang diterima Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam APBD tahun anggaran 2013 sampai dengan 2020. Untuk keperluan analisis flypaper effect, pendapatan transfer ini kemudian dipisahkan untuk melihat responsivitas belanja daerah terhadap masing-masing pendapatan transfer, diantaranya:

Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
Pendapatan Bagi Hasil Bukan Dari Pajak;
Dana Alokasi Umum; dan
Dana Alokasi Khusus.

Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi data panel, dimana model pengujian analisis data dalam penelitian ini akan membentuk persamaan sebagai berikut (Caroline & Widodo, 2020:76-84):

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \epsilon_{it} \quad (\text{Common Effect})$$

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \epsilon_{it} \quad (\text{Fixed Effect Modal})$$

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + u_{it} + \epsilon_{it} \quad (\text{Random Effect Modal})$$

Keterangan:

Y1 : Belanja Daerah
X1 : Pendapatan Asli Daerah
X2 : Pendapatan Bagi Hasil Pajak
X3 : Pendapatan Bagi Hasil Bukan dari Pajak
X4 : Dana Alokasi Umum
X5 : Dana Alokasi Khusus
 α_{it} : Konstanta
 α_i : Konstanta masing-masing individu
 β_1 : Koefisien Regresi X1 terhadap Y
 β_2 : Koefisien Regresi X2 terhadap Y
 β_3 : Koefisien Regresi X3 terhadap Y
 β_4 : Koefisien Regresi X4 terhadap Y
 β_5 : Koefisien Regresi X5 terhadap Y
 ϵ_{it} : Residual
uit : Residual masing-masing individu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah sebuah bilangan yang menyebutkan proporsi variasi perubahan variabel dependen yang ditentukan oleh variasi perubahan variabel independen. Berikut ini disajikan hasil uji koefisien determinasi pada model penelitian yang terbentuk.

Tabel 2.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Dependen	Independen	R ²
Belanja Daerah	Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bukan Dari Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus	0,9077

Hasil pengujian koefisien determinasi untuk persamaan regresi menunjukkan nilai R² sebesar 0,9077, yang bermakna perubahan belanja daerah mampu dijelaskan oleh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Bagi Hasil Bukan dari Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebesar 90,77%, sisanya sebesar 9,23% perubahan belanja daerah dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

Hasil Goodness of Fit Test

Uji F atau Goodness of Fit Test adalah pengujian kelayakan model. Model yang layak adalah model yang dapat digunakan untuk mengestimasi populasi. Berikut ini disajikan hasil uji F pada model penelitian yang terbentuk.

Tabel 3.
Hasil Uji F

Dependen	Independen	Sig.
Belanja Daerah	Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bukan Dari Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus	0,0000

Hasil uji F menunjukkan nilai prob > F kurang dari 0,05 (0,0000), sehingga model regresi dinyatakan layak dan dapat digunakan untuk mengestimasi populasi.

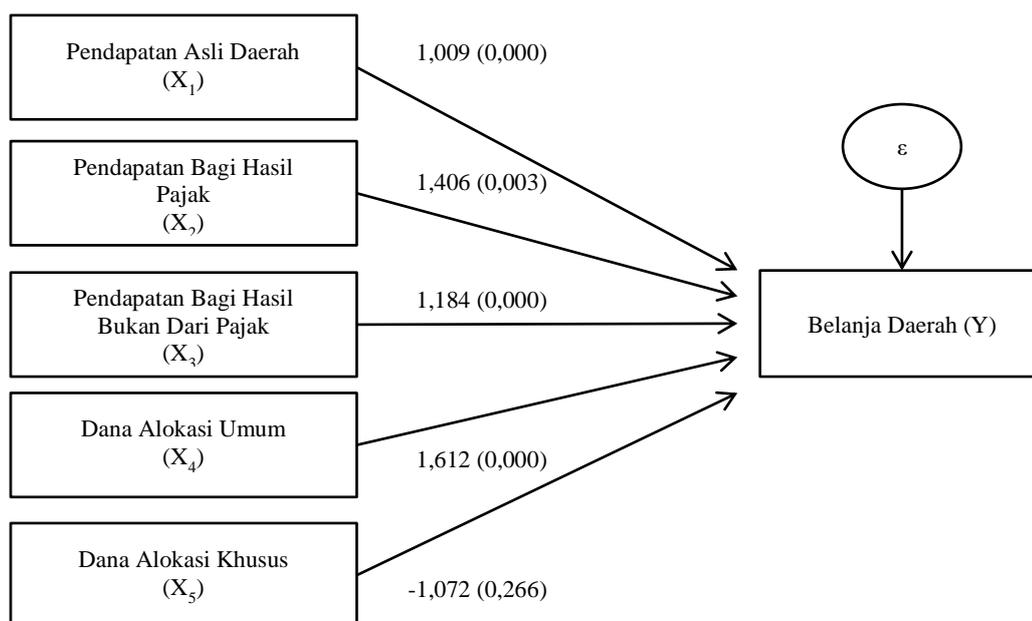
Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t, untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Berikut ini disajikan hasil uji hipotesis pada model penelitian yang terbentuk.

Tabel 4.
Hasil Uji t

Dependen	Independen	Koefisien	statistic	Sig.
Belanja Daerah	Pendapatan Asli Daerah	1,009	4,69	0,000
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	1,406	3,08	0,003
	Pendapata Bagi Hasil Bukan Dari Pajak	1,184	8,34	0,000
	Dana Alokasi Umum	1,612	4,36	0,000
	Dana Alokasi Khusus	-1,072	-1,12	0,266

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang disajikan pada Tabel 4, kemudian disusun kedalam model hasil pengujian yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.
Common Effect Model dengan Robust Standard Errors

Model hasil pengujian analisis data tersebut akan membentuk persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = 0,085 + 1,009X_1 + 1,406X_2 + 1,184X_3 + 1,612X_4 - 1,072X_5 + \varepsilon$$

Hasil pengujian analisis data dalam penelitian ini kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu dengan membandingkan nilai koefisien dan tingkat signifikansi pengaruh pendapatan asli daerah sebagai pendapatan daerah sendiri terhadap perubahan belanja daerah dengan pengaruh pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil bukan dari pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebagai pendapatan daerah dari transfer pemerintah pusat terhadap perubahan belanja daerah.

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan kelompok pendapatan transfer (pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil bukan dari pajak dan dana alokasi umum), keduanya berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan dana alokasi khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah. Namun ketiganya dari kelompok pendapatan transfer, yaitu pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil bukan dari pajak dan dana alokasi umum memiliki nilai koefisien regresi yang lebih besar daripada pendapatan asli daerah, sehingga dapat disimpulkan terjadi flypaper effect pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil pengujian hipotesis untuk melihat ada tidaknya flypaper effect pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan kelompok pendapatan transfer (pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil bukan dari pajak dan dana alokasi umum), keduanya berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan dana alokasi khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah. Namun ketiganya dari kelompok pendapatan transfer, yaitu pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil bukan dari pajak dan dana alokasi umum memiliki nilai koefisien regresi yang lebih besar daripada pendapatan asli daerah, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi flypaper effect pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sampai dengan dilakukannya pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi langkah awal dimulainya otonomi daerah di Indonesia. Meskipun awal mula pendelegasian ini dipicu oleh adanya krisis ekonomi dan politik pada tahun 1998, dampak pendelegasian ini sejatinya dimaksudkan pula untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah sebagai pelaksana anggaran daerah, dirasa memiliki informasi yang lebih sempurna tentang sektor mana dari alokasi anggaran yang mungkin dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun terdapat kekhawatiran ketika pemerintah daerah menerima bantuan dana dari pemerintah pusat, dimana hal ini justru dapat meningkatkan pengeluaran belanja daerah lebih dari yang diharapkan seandainya uang yang sama diperoleh secara mandiri melalui pendapatan asli daerah. Fenomena ini kemudian disebut sebagai flypaper effect.

Hal ini karena dana transfer dari pemerintah pusat yang memberikan kontribusi besar pada belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan asli daerah akan menciptakan insentif bagi pemerintah daerah, yang memiliki kekuasaan atas kebijakan daerah dan lebih mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah, untuk meningkatkan belanja daerah tanpa perlu meningkatkan pendapatan daerah. Sumber pendapatan ini kemudian memikat pemerintah daerah untuk cenderung memenuhi kondisi tertentu yang diperlukan untuk menarik lebih banyak transfer dari pemerintah pusat, daripada kondisi dan kebutuhan masyarakat daerah yang mereka layani. Sehingga mengikis esensi dari desentralisasi, yaitu mendorong terbentuknya daerah yang otonom.

Dana alokasi umum dalam penelitian ini memiliki pengaruh terbesar dalam menentukan besarnya perubahan belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dana daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Dalam formulasinya, secara umum besarnya dana alokasi umum yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sangat bergantung kepada besarnya celah fiskal yang masih dimiliki suatu daerah setelah memperhitungkan kebutuhan belanjanya dan kapasitas fiskalnya. Sehingga semakin besar celah fiskal yang dimiliki suatu daerah, semakin besar pula potensi suatu daerah untuk memanfaatkannya agar mendapat dana alokasi umum yang lebih besar. Tanpa harus memberi upaya berlebih untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah, peningkatan belanja daerah dapat tetap dilakukan dengan mengandalkan besarnya dana alokasi umum yang diterima.

Seperti yang terjadi pada kenaikan belanja daerah pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dimana kenaikan belanja daerah yang terjadi ternyata disertai oleh adanya kenaikan jumlah DAU yang diterima masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Begitu juga dengan penurunan belanja daerah pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (kecuali Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu). Diketahui juga bahwa penurunan belanja daerah yang terjadi ternyata disertai oleh adanya penurunan jumlah DAU yang diterima masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Selain itu, besarnya pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil bukan dari pajak menjadi variabel lainnya yang mempengaruhi besarnya perubahan belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun dana bagi hasil merupakan bagian dari transfer pemerintah pusat ke daerah, namun sumber pendapatan ini dibagikan berdasarkan besarnya kontribusi daerah bersangkutan dalam penerimaan daerah dari berbagai sumber pendapatan daerah yang akan disalurkan menjadi dana bagi hasil. Sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan dana bagi hasil ini dengan memaksimalkan kontribusinya dalam berbagai sumber pendapatan daerah yang akan disalurkan menjadi dana bagi hasil, yang kemudian juga memberikan dampak dalam meningkatkan porsi belanja daerah.

Meskipun pengaruhnya terhadap perubahan belanja daerah tidak sebesar DAU, pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, peningkatan belanja daerah terjadi karena peningkatan jumlah DBH Pajak yang diterima seperti pada belanja daerah Kota Bontang, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur tahun 2019 dibandingkan belanja daerah pada tahun 2018. Sebaliknya pada saat penerimaan DBH Pajak mengalami penurunan, jumlah belanja daerah juga ikut mengalami penurunan seperti yang terjadi pada belanja daerah Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur tahun 2020 dibandingkan belanja daerah pada tahun 2019. Begitu juga dengan peningkatan DBH bukan dari Pajak yang mempengaruhi peningkatan belanja daerah pada Kabupaten Berau, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Samarinda tahun 2019 dibandingkan belanja daerah pada tahun 2018.

Pada hasil pengujian lainnya, PAD sebagai sumber pendapatan yang menjadi tolak ukur dari kemandirian keuangan suatu daerah justru memiliki elastisitas pengaruh yang tidak lebih besar dari berbagai sumber pendapatan lainnya seperti DAU, DBH Pajak dan DBH bukan dari Pajak. Sehingga perubahan besaran belanja daerah lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan pendapatan transfer dibandingkan perubahan pendapatan asli daerah itu sendiri.

Kabupaten Berau misalnya pada tahun 2015 mengalami kenaikan belanja daerah dibandingkan tahun 2014, namun peningkatan itu justru terjadi saat PAD sedang mengalami penurunan. Atau pada tahun 2020 mengalami penurunan belanja daerah dibandingkan tahun 2019, padahal PAD pada tahun yang sama mengalami peningkatan. Kota Bontang sepanjang tahun 2013-2016 mengalami perubahan belanja daerah yang justru berbanding terbalik dengan perubahan PAD nya. Kabupaten Kutai Barat sepanjang tahun 2013-2018 juga mengalami perubahan belanja daerah yang justru berbanding terbalik dengan perubahan PAD nya. Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang tahun 2016-2020 juga mengalami perubahan belanja daerah yang justru berbanding terbalik dengan perubahan PAD nya, serta Kabupaten Kutai Timur sepanjang tahun 2014-2018 juga mengalami perubahan belanja daerah yang justru berbanding terbalik dengan perubahan PAD nya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hanya dana alokasi khusus sebagai bagian dari transfer pemerintah pusat kepada daerah yang tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam perubahan besarnya belanja daerah. Hal ini dikarenakan dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sehingga pemerintah daerah tidak dapat menjadikan besar kecilnya dana alokasi khusus sebagai acuan untuk dapat meningkatkan porsi belanja daerahnya. Sehingga dana alokasi khusus dapat menjadi solusi terbaik bagi pemerintah pusat dalam upaya membantu keuangan pemerintah daerah, tanpa harus khawatir dana bantuan tersebut dimanfaatkan daerah untuk meningkatkan belanja daerahnya tanpa adanya upaya mencapai kemandirian daerah di masa depan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Swasito (2021) yang menemukan bahwa kebijakan belanja pemerintah daerah lebih responsif terhadap kenaikan atau penurunan penerimaan daerah dari

dana alokasi umum. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Soeharjoto et al. (2020) yang juga membuktikan pengaruh positif dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah meskipun elastisitas perubahan belanja daerah akibat besarnya dana alokasi umum yang diterima masih lebih besar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi flypaper effect pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dimana kelompok pendapatan transfer, yaitu pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil bukan dari pajak dan dana alokasi umum memiliki nilai koefisien regresi yang lebih besar daripada pendapatan asli daerah. Artinya perubahan besaran belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur lebih bergantung kepada perubahan kelompok belanja transfer dibandingkan dengan pendapat asli daerahnya sendiri sehingga secara tidak langsung fenomena flypaper effect tersebut mengikis esensi dari desentralisasi untuk membentuk daerah yang otonom. Selain itu, hanya dana alokasi khusus sebagai bagian dari transfer pemerintah pusat kepada daerah yang tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam perubahan besarnya belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bailey, S. J., & Connolly, S. (1998). The Flypaper Effect: Identifying Areas for Further Research. *Public Choice* 95, 335-361.
- Caroline, E., & Widodo, H. (2020). *Aplikasi Ekonometrika Spasial Dengan Software STATA*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Gramlich, E. (1969). State and Local Governments and their Budget Constraint. *International Economic Review*, Vol. 10(June), 163-182.
- Henderson, J. (1968), Local Government Expenditures: A Social Welfare Analysis. *Review of Economics and Statistics*, Vol. 50(May), 156-163.
- Kusuma, H. (2017). Flypaper Effect: Fiscal Illusion and Bureaucratic Model. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 9(1), 28-40.
- Neyapti, B. (2010). Fiscal Decentralization and Deficits: International Evidence. *European Journal of Political Economy*, Vol. 26(2), 155-166.
- Oates, W. (1999). An Easy of Fiscal Federalism. *Journal of Economics Literature* 37, 1120-1149.
- Rao, G. V., & Singh, N. (1998). Intergovernmental Transfers: Rationale, Design and Indian Experience. Working Paper, Centre for International Development, Stanford University.
- Soeharjoto, S., Tribudhi, D., Hariyanti, D., Rustam, R., & Syofyan, S. (2020). Flypaper Effect on Regional Spending in Central Java Province. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*. Vol. 4(4), 1053-1059.
- Swasito, A. P. (2021). Apakah Fenomena Flypaper Effect Asimetris Terjadi pada Kebijakan Belanja Pemerintah Daerah?. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol. 3(1), 72-80.
- Thompson, F., & Green, M. T. (1998). *Handbook of Public Finance*. New York: Routledge.
- Tresch, R. W. (2022). *Public Finance: A Normative Theory*. Cambridge: Academic Press.